



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2025





PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA(DP3AP2KB)
KOTA BATAM TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 01 Juli 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Batam



Wati Harmadyastuti, S.Sos, M.M
NIP. 197611282002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 5

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 50

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 50

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH..... 52

BAB IV PENUTUP 128

4.1Catatan Penting..... 128

4.2Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 128

4.3Rencana Tindak Lanjut..... 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja *Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana* Tahun 2025 s/d Triwulan II 50

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 52

Tabel 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 54

Tabel 3.3 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2025 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 25/900.1.1.2A/I/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, *terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru*);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2003 tentang Pengalihan sebagian Tugas Dinas Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ke Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota)
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Di Daerah;
 13. Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 16. Peraturan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 20. Peraturan walikota Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada TW II tahun 2025 tidak ada

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

* Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja berupa persentase terpenuhinya dukungan terhadap urusan pemerintahan, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 50%.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sudah terealisasi 50.06%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sudah terealisasi 50.09%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sudah terealisasi 49.88%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sudah terealisasi 50.08%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sudah terealisasi 49.77%

* Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam dengan indikator program Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam dengan target capaian 11.5%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 7%

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sudah terealisasi 49.91%
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota sudah terealisasi 50.07%

- * Program Perlindungan Perempuan dengan indikator program Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 49.60%
- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti, dengan target capaian 40%. Sudah terealisasi 25% hingga Triwulan II
- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk, dengan target capaian 30%. Sudah terealisasi 10% hingga Triwulan II
- * Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator program Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam, dengan target capaian sebesar 5%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 3%
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sudah dengan indikator kegiatan Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif, dengan target capaian 80%. Sudah terealisasi 40.09% hingga Triwulan II.
- * Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator program dengan indikator program Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG, dengan target capaian sebesar 80%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 39.99%
- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap, dengan target capaian 80%. Sudah terealisasi 40% hingga Triwulan II.
- * Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator program Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak, dengan target capaian sebesar 820 skor. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 217 skor.
- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA, dengan target capaian 70%. Sudah terealisasi 34.78% hingga Triwulan II.
- * Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator program Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan, dengan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 49.57%.
- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti/yang dilayani), dengan target capaian 65%. Sudah terealisasi 29.82% hingga Triwulan II.
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti/Dirujuk, dengan target capaian 65%. Sudah terealisasi 29.77% hingga Triwulan II.
- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti, dengan target capaian 65%. Sudah terealisasi 29.59% hingga Triwulan II.

*Program Pengendalian Penduduk dengan indikator program Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK, dengan target capaian sebesar 60%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 29.99%.

- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan indikator kegiatan Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan, dengan target capaian 60%. Sudah terealisasi 30% hingga Triwulan II.
- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi, dengan target capaian 100%. Sudah terealisasi 49.87% hingga Triwulan II.

* Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator program Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)/ Unmeet Need, dengan target capaian sebesar 83%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 40.14%.

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan indikator kegiatan Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi, dengan target capaian 100%. Sudah terealisasi 49.79% hingga Triwulan II.
- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan indikator kegiatan Persentase tenaga lini/kader yang aktif, dengan target capaian 70%. Sudah terealisasi 34.87% hingga Triwulan II
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB, dengan target capaian 84%. Sudah terealisasi 41.60% hingga Triwulan II
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator kegiatan Presentase kampung KB yang aktif, dengan target capaian 70%. Sudah terealisasi 34.89% hingga Triwulan II.

* Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator program Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif, dengan target capaian sebesar 60%. Hingga Triwulan II, realisasi program telah mencapai 29.78%.

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kegiatan Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina, dengan target capaian 100%. Sudah terealisasi 49.90% hingga Triwulan II
- Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kegiatan Persentase Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan Pemantauan dan Pendampingan), dengan target capaian 50%. Sudah terealisasi 24.80% hingga Triwulan II

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada TW II tahun 2025 tidak ada

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, da Keluarga Berencana Kota Batam

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
		DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNG AN ANAK, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.08	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUNGA N ANAK															

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Perse ntase	100	11.684. 977.37 2	Perse ntase	100	12.452. 418.520	27.51	2.954. 027.7 87	32	1.665 .199. 537	27.51	4.619.22 7.324	27.51	37,10
	2.08.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Perse ntase	100	10.592. 778.62 2	Perse ntase	100	11.579. 087.380	27.5	2.712. 720.4 88	32	1.550 .815. 096	32	4.263.53 5.584	32	36,82
	2.08.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/bul an	62,0 0	10.592. 778.622	Orang /bula n	62	11.528.5 47.380	54	2.694. 310.48 8	54	1.544. 735.0 96	54	4.239.04 5.584	40	36.77
	2.08.01.2.0 2.0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	12	0	Doku men	12	50.540.0 00	3	18.410 .000	2	6.080. 000	5	24.490.0 00	50	48.46
	2.08.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Perse ntase	100, 00	283.44 9.550	Perse ntase	100, 00	274.194. 500	61.19	109.92 1.326	70	19.16 5.321	70	129.086. 647	70	47,08

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.08.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.996.0 00	Paket	3	6.996.00 0	0	-	0	-	0	-	25	0
	2.08.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	47.742. 050	Paket	4	47.018.0 00	4	24.657 .500	0	-	4	24.657.5 00	90	88.88
	2.08.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.838.0 00	Paket	1	10.302.0 00	1	4.296. 000	0	-	1	4.296.00 0	85	84.19
	2.08.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	18.036. 000	Paket	3	5.041.00 0	0	-	0	-	0	-	25	0
	2.08.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12.071. 000	Paket	2	12.071.0 00	0	-	0	-	0	-	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.08.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	11	192.766 .500	Lapor an	11	192.766. 500	5	80.967 .826	2	19.16 5.321	7	100.133. 147	70	66.70
	2.08.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Perse ntase	100	393.93 8.000	Perse ntase	100	65.022. 000	15	-	17	-	17	-	17	-
	2.08.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		174.338 .000	Unit	0		0	-	0	-	0	0	0	0
	2.08.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	219.600 .000	Unit	18	65.022.0 00	0	-	0	-	0	0	23	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Perse ntase	100	237.51 6.200	Perse ntase	100	354.319 .640	36.72	108.8 85.97 3	49	58.21 9.120	49	167.105. 093	49	47,16
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12	117.299 .400	Lapor an	12	117.299. 400	3	15.334 .259	2	10.68 4.644	5	26.018.9 03	27	22.18
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	4	120.216 .800	Lapor an	4	237.020. 240	1	93.551 .714	1	47.53 4.476	2	141.086. 190	60	59.52

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Perse ntase	100	177.29 5.000	Perse ntase	100	179.795 .000	18.94	22.50 0.000	27	37.00 0.000				
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	79.030. 000	Unit	2	81.530.0 00	2	12.000 .000	2	19.00 0.000	2	31.000.0 00	100	38,02

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	80.805. 000	Unit	7	80.805.0 00	7	10.500 .000	7	18.00 0.000	7	28.500.0 00	100	35,27
	2.08.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	17.460. 000	Unit	26	17.460.0 00	0	-	0	-	0	-	0	-
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Perse ntase	11,5	617.00 0.000	Perse ntase	11,5	2.108.1 20.000	5	914.8 67.00 0	2	49.97 5.000	7	964.842. 000	60,87	45,77

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Perse ntase	80	152.000 0.000	Perse ntase	80	152.000 .000	40	10.328 8.000	43	-	43	10.328.0 00	43	6,79
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Doku men	35	152.000 .000	Doku men	35	152.000. 000	9	10.328 .000	12	-	21	10.328.0 00	21	6,79

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Perse ntase	80	465.000.000	Perse ntase	80	1.956.120.000	40	904.539.000	52	49.975.000	52	954.514.000	75	48,80
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	2	465.000.000	Doku men	2	1.956.120.000	1	904.539.000	0	49.975.000	1	954.514.000	75	48,80

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Perse ntase	100	220.00 0.000	Perse ntase	100	213.153 .000		-			0	1.851.24 7.700	25	0
	2.08.03.2. 01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Perse ntase	40	220.00 0.000	Perse ntase	40	213.153 .000	5	-	7	-	0	1.851.24 7.700	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.03.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	55	220.000 .000	Doku men	55	213.153. 000	0	-	0	-	0	1.851.24 7.700	25	0
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Perse ntase	5	2.046.3 12.519	Perse ntase	5	2.542.5 62.519	2	1.755. 258.7 00	1	95.98 9.000	3	1.851.24 7.700	60	72,81

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Perse ntase	80	2.046.312.519	Perse ntase	80	2.542.562.519	40	1.755.258.700	45	95.989.000	45	1.851.247.700	45	72,81
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	2	2.046.312.519	Doku men	2	2.542.562.519	1	1.755.258.700	1	95989000	2	1.851.247.700	87	82.73

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2.046.312.519	Dokumen	2	2.542.562.519	1	1.755.258.700	1	95989000	2	1.851.247.700	87	82.73
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Persentase	80	190.000.000	Persentase	80	99.856.000	18	-	12	4.014.000	30	4.014.000	37,5	4,02

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Perse ntase	80	190.000.000	Perse ntase	80	99.856.000	18	-	5	4.014.000	23	4.014.000	30	23.31
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	44	190.000.000	Doku men	44	99.856.000	0	-	10	4.014.000	10	4.014.000	30	23.31

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	820	310.00 0.000	Skor	820	254.442 .000	164	15.00 0.000	53	28.78 0.000	217	43.780.0 00	26,46	17,21
	2.08.06.2. 01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah , dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	Perse ntase	70	310.00 0.000	Perse ntase	70	254.442 .000	20	15.00 0.000	5	28.78 0.000	25	43.780.0 00	35,71	17,21
	2.08.06.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Doku men	5	310.000 .000	Doku men	5	254.442. 000	1	15.000 .000	2	28.78 0.000	3	43.780.0 00	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Perse ntase	100	170.52 0.000	Perse ntase	100	170.520 .000		-		40.49 5.000				
	2.08.07.2. 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti /yang dilayani)	Perse ntase	65	101.50 0.000	Perse ntase	65	101.500 .000	20	-	8	40.49 5.000	28	40.495.0 00	40	39,90
	2.08.07.2.0 1.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Oran g	40	101.500 .000	Orang	40	101.500. 000	0	-	17	40.49 5.000	17	40.495.0 00	40	39,90

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti /Dirujuk	Perse ntase	65	69.020.000	Perse ntase	65	69.020.000	18	-	5	-	23	0	23	0
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Oran g	40	69.020.000	Orang	40	69.020.000	0	-	0	-			23	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.142.181.496			7.369.672.800								
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	Perse ntase	60	358.200.000	Perse ntase	60	355.860.000	18	-	5	63.883.000	23	63.883.000	38,33	17,95

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Perse ntase	60	45.000.000	Perse ntase	60	46.260.000	18	-	5	-	23	0	23	0
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Doku men	1	45.000.000	Doku men	1	46.260.000	0	-	0	-			23	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatk an sosialisasi	Perse ntase	100	13.200. 000	Perse ntase	1309.600. 0000 0		18	-	5	63.88 3.000	23	63.883.0 00	23	20,63
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggar aan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyellenggar aan sistim Informasi Keluarga	Lapor an	12	60.000. 000	Lapor an	12	60.000.0 00	3	-	2	29.38 3.000				
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Lapor an	12	253.200 .000	Lapor an	12	249.600. 000	3	-	2	34.50 0.000				

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate) Unmeet Need	Perse ntase	83	4.336.6 51.600	Perse ntase	83	3.203.19 6.800	18	35.7 17.3 20	12	716.9 84.96 5	30	752.702. 285	36,14	23,50
	2.14.03.2. 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatk an sosialisasi	Perse ntase	100	1.389.2 03.600	Perse ntase	100	1.066.27 6.800	18	23.7 17.3 20	15	229.5 58.96 5	33	253.276. 285	33	23,75
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Lapor an	0	80.000. 000	Lapor an	0	-	0	-	0	-				

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lapor an	1	739.200 .000	Lapor an	1	628.316. 800	0	23.7 17.3 20	0	158.8 92.96 5	0	182.610. 285	33	29,06

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Doku men	1	100.000 .000	Doku men	4	34.000.0 00	0	-	0	-		-	23	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.03.2.0 1.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Doku men	4	190.003 .600	Doku men	4	63.960.0 00	1	-	0	2.150. 000	1	2.150.00 0	23	3,36

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lapor an	1	180.000 .000	Lapor an	1	240.000. 000	0	-	0	68.51 6.000	0	68.516.0 00	33	28,55

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Orga nisasi	96	100.000 .000	Organ isasi	96	100.000. 000	24	-	3	-	27	-	23	0
	2.14.03.2. 02	Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Perse ntase	70	192.00 0.000	Perse ntase	70	512.000 .000	18	-	5	153.6 00.00 0	23	153.600. 000	23	30
	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Oran g	552	192.000 .000	Orang	552	512.000. 000	100	-	76	153.6 00.00 0	176	153.600. 000	32	30

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.0 2.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Lapor an	0	0	Lapor an	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	Presentase	84	2.596.798.000	Presentase	84	1.473.720.000	18	12.000.000	5	299.376.000	23	311.376.000	23	21,13
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	161.100.000	Laporan	12	158.400.000	3	12.000.000	2	21.020.000	5	33.020.000	28	20,85

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	625	1.383.7 24.000	Orang	625	1.222.62 0.000	250	-	102	221.7 81.00 0	352	221.781. 000	25	18,14
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Laporan	12	-	Laporan	12	92.700.0 00	3	-	2	56.57 5.000	5	56.575.0 00	65	61,03
	2.14.03.2.0 3.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Laporan	0	1.051.9 74.000	Laporan	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.03.2. 04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase kampung KB yang aktif	Perse ntase	70	158.65 0.000	Perse ntase	70	151.200 .000	18	-	5	34.45 0.000	23	34.450.0 00	32,86	22,78

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	13	158.650.000	Kampung	13	151.200.000	13	-	13	34.450.000	13	34.450.000	41.6	22,78
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Persentase	60	2.447.329.896	Persentase	60	3.810.616.000		-		1.076.819.493				

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Perse ntase	100	2.447.329.896	Perse ntase	100	220.216.000	18	-	12	-	30	-	30	0
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	29	120.000.000	Unit	20	130.000.000	0	-	0	-	0	0	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	12	94.259.969	Laporan	12	90.216.000	0	-	0	-	0	0	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.04.2.0 1.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Oran g	0	2.233.0 69.927	Orang	450	-	0	-	0	-	0	0	0	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.04.2. 02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran , baduta/balita) yang dilakukan Pemantauan dan Pendampingan	Perse ntase	50	-	Perse ntase	50	3.590.4 00.000	5	-	5	1.076 .819. 493	10	1.076.81 9.493	20	29,99

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	lapor an	12	-	lapor an	12	1.958.40 0.000	3	-	2	587.5 20.00 0	5	587.520. 000	33	30

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
										TW I		TW II					
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.	KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) laporan	laporan	12	-	laporan	12	1.632.000.000	3	-	2	489.299.493	5	489.299.493	32	29,98
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK															

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08	URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK				307.48 0.000			302.955 .000								
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Perse ntase	100	72.000. 000	Perse ntase	100	72.815. 000		3.685. 250		290.0 00				
	2.08.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Perse ntase	100, 00	12.000. 000	Perse ntase	100, 00	12.037. 000	27.5	3.685. 250	5	290.0 00	32.5	3.975.25 0	32.5	33,03

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.000. 000	Paket	2	10.047.0 00	23.685.2 50	0	-		2	3.685.25 0	85	36,68
	2.08.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.000.0 00	Paket	2	1.990.00 0	0	-	1	290.0 00	1	290.000	30	14,57
	2.08.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Perse ntase	100	60.000. 000	Perse ntase	100	60.778. 000		-		-	0	0	25	0
	2.08.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	60.000. 000	Unit	1	60.778.0 00	0	-	0	-	0	0	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Perse ntase	100	77.565. 000	Perse ntase	100	77.5 65.0 00		-		-				
	2.08.03.2. 02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	Perse ntase	30	77.565. 000	Perse ntase	30	77.5 65.0 00		-		-	0	0	25	0

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATA N/SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.03.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Layan an	17	77.565. 000	Layan an	17	77.5 65.0 00	0	-	0	-	0	0	25	0
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUN GAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Perse ntase	100	157.91 5.000	Perse ntase	100	152. 575. 000		-		-				

No.	KODE URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2025	
				SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	SAT UAN	KIN ERJ A	Rp.	TW I		TW II		KINERJA	Rp	KINER JA (%)	Rp (%)
										KINE RJA	Rp.	KIN ERJ A	Rp.				
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase	65	157.915.000	Persentase	65	152.575.000		-		-	0	0	25	0
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	52	157.915.000	Orang	52	152.575.000	0	-	0	-	0	0	25	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Gender	Persentase	94.50	Persentase	51.76	
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase	58.60	Persentase	39.37	
3	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	7.00	Persentase	2.95	
4	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persentase	2.30	Persentase	1.04	
5	Indeks Pembangunan Keluarga	Persentase	57.30	Persentase	25.55	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan Kota Batam
2. Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan
3. Tingkat Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak
4. Kelestarian Ber-KB
5. Pernikahan Remaja Usia Dini
6. Angka Stunting Kota Batam
7. Peningkatan Kualitas Kelompok Kegiatan untuk melakukan KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera
8. Kompetensi SDM Internal

9. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi Lintas Sektoral
10. Belum optimalnya implementasi Grand Design Kependudukan
11. Belum optimalnya edukasi tentang perencanaan keluarga
12. Masih kurangnya tenaga lini lapangan KB yang mendukung pelaksanaan program bangga kencana di tingkat kecamatan dan kelurahan
13. Belum optimalnya edukasi dini tentang kesehatan reproduksi dan generasi berencana bagi remaja kota Batam
14. Belum optimalnya pelaksanaan dan pembinaan kelompok ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga sejahtera
15. Masih kurangnya tenaga lini lapangan KB yang mendukung pelaksanaan program bangga kencana di tingkat kecamatan dan kelurahan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran di tingkat Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun mendatang. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kesetaraan gender serta kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,74	95,76	95,78	95,80	95,82	95,84
			Persentase Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang Aktif	65%	70%	75%	80%	85%	90%
1		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	61.32	61.34	61.36	61.38	61,40	61,42

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Skor Capaian Kota Layak Anak	830	840	850	860	860	880
3		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	7,80%	7,75%	7,70%	7,65%	7,60%	7,58%
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya Perencanaan Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,07
5		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam	91.18	91.20	91.22	91.24	91.26	91.28

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam juga untuk mengakomodir adanya perubahan belanja yang ada di APBD 2025 dengan RKPD 2025 serta RKPD-P 2025 yang disebabkan karena adanya pemetaan kegiatan yang bersumber anggaran dari DAK Non Fisik BOKKB dan DAK Non Fisik BOPPA Tahun 2025.

Tabel 3.2
Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam				25.513.699.839				25.090.288.208	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				25.513.699.839				25.090.288.208	
	Bidang dan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam				25.210.744.839				24.794.758.208	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.841.072.039				17.570.243.408	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan			12.452.418.520	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	72 Nilai 91.18 Nilai		13.728.471.780	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Kota Batam	11.579.087.380	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	Kota Batam	12.902.304.288	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	Kota Batam	11.528.547.380	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	Kota Batam	12.851.764.288	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Batam	50.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Batam	50.540.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Kota Batam	274.194.500	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	Kota Batam	212.376.500	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Batam	6.996.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Batam	3.461.000	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Batam	47.018.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Batam	43.788.000	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Batam	10.302.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Batam	5.103.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Batam	5.041.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Batam	5.041.000	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Batam	12.071.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Batam	6.035.500	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	Kota Batam	192.766.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	Kota Batam	148.948.000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	Kota Batam	65.022.000	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	Kota Batam	74.349.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Kota Batam	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Kota Batam	0	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Kota Batam	65.022.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Batam	74.349.500	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	Kota Batam	354.319.640	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	Kota Batam	362.696.492	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Batam	117.299.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Batam	121.886.400	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	Kota Batam	237.020.240	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Batam	240.810.092	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		yang Disediakan								
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	Kota Batam	179.795.000	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	Kota Batam	176.745.000	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Batam	81.530.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Batam	81.530.000	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	7 Unit	Kota Batam	80.805.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Batam	80.805.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Pajak dan Perizinannya								
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Kota Batam	17.460.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Kota Batam	14.410.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,50 / 75%	Kota Batam	2.108.120.000	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	12% 78%	Kota Batam	1.204.104.369	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	80%	Kota Batam	152.000.000	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	80%	Kota Batam	10.328.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	Kota Batam	152.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	Kota Batam	10.328.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	80%	Kota Batam	1.956.120.000	Persentase perempuan yang dibina	78%	Kota Batam	1.193.776.369	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	2 Dokumen	Kota Batam	1.956.120.000	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Batam	1.193.776.369,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Kabupaten/ Kota								
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	Kota Batam	213.153.000	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	Kota Batam	24.358.500	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	Kota Batam	213.153.000	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti	50%	Kota Batam	24.358.500	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	57 Dokumen	Kota Batam	213.153.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	57 Dokumen	Kota Batam	24.358.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Kewenangan Kabupaten/Kota				kewenangan kabupaten/kota				
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5	Kota Batam	2.542.562.519	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	4,6%	Kota Batam	2.237.817.759	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	80%	Kota Batam	2.542.562.519	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina	72%	Kota Batam	2.237.817.759	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kota Batam	2.542.562.519	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kota Batam	2.237.817.759	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	80%	Kota Batam	99.856.000	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	100%	Kota Batam	17.223.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	80%	Kota Batam	99.856.000	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif	80%	Kota Batam	17.223.000	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	44 Dokumen	Kota Batam	99.856.000	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	Kota Batam	17.223.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Kabupaten/ Kota								
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	820	Kota Batam	254.442.000	Persentase capaian kluster kota layak anak	0,72	Kota Batam	187.748.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	70%	Kota Batam	254.442.000	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA	70%	Kota Batam	187.748.000	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Batam	254.442.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Batam	187.748.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	Kota Batam	170.520.000	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	Kota Batam	170.520.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti/yang dilayani)	75%	Kota Batam	101.500.000	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti	70%	Kota Batam	101.500.000	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 Orang	Kota Batam	101.500.000	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 Orang	Kota Batam	101.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti /dirujuk	65%	Kota Batam	69.020.000	Persentase lembaga layanan anak yang dibina	50%	Kota Batam	69.020.000	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	Kota Batam	69.020.000	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	40 Orang	Kota Batam	69.020.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.369.672.800				7.224.514.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	60%	Kota Batam	355.860.000	Persentase Stekeholder yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	60%	Kota Batam	324.720.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	60%	Kota Batam	46.260.000	Persentase Stakeholder yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan	60%	Kota Batam	15.120.000	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Batam	46.260.000,00	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan pamanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Batam	15.120.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard	100%/ 50%	Kota Batam	309.600.000	Persentase pemanfaatan data SIGA	60%	Kota Batam	309.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/ PUS yang mendapatkan sosialisasi								
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	Kota Batam	60.000.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggara n sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	Kota Batam	60.000.000	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Kota Batam	249.600.000	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	Kota Batam	249.600.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	83% / 8.5	Kota Batam	3.203.196.800	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	81.60%	Kota Batam	3.154.706.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 50%	Kota Batam	1.066.276.800	Persentase PUS yang ber KB baru	52%	Kota Batam	1.017.786.800	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	96 Organisasi	Kota Batam	100.000.000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	96 Organisasi	Kota Batam	100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				Stakeholders dan Mitra Kerja				
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	Kota Batam	63.960.000	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	Kota Batam	15.470.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Laporan	Kota Batam	34.000.000	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Laporan	Kota Batam	34.000.000	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Kota Batam	240.000.000	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	1 Laporan	Kota Batam	240.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Kota Batam	628.316.800	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Kota Batam	628.316.800	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	Kota Batam	0	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0	Kota Batam	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	Kota Batam	512.000.000	Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif	70%	Kota Batam	512.000.000	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang		512.000.000	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang		512.000.000	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Peny			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				uluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	84%	Kota Batam	1.473.720.000	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	84%	Kota Batam	1.473.720.000	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	12 Laporan	Kota Batam	158.400.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kota Batam	158.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Jaringan dan Jejaringnya								
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	Kota Batam	1.222.620.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	Kota Batam	1.222.620.000	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	Kota Batam	0	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	Kota Batam	0	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	12 Laporan	Kota Batam	92.700.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	12 Laporan	Kota Batam	92.700.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Jaringan dan Jejaringnya				Jaringan dan Jejaringnya				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	70%	Kota Batam	151.200.000	Persentase kampung KB yang aktif	72%	Kota Batam	151.200.000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	13 Kampung	Kota Batam	151.200.000	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kampung	Kota Batam	151.200.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Keluarga Berencana)								
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	60%	Kota Batam	3.810.616.000	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	65%	Kota Batam	3.745.088.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	Kota Batam	220.216.000	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	72%	Kota Batam	154.688.000	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	20 Unit	Kota Batam	130.000.000	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	20 Unit	Kota Batam	130.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	Kota Batam	90.216.000	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	Kota Batam	24.688.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	Kota Batam	-	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0	Kota Batam	0	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran	100%	Kota Batam	3.590.400.000	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil, pasca salin/	70%	Kota Batam	3.590.400.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		n, baduta/balita) yang dilakukan Pemantauan dan Pendampingan				kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan				
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	Kota Batam	1.958.400.000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	Kota Batam	1.958.400.000	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	12 Laporan	Kota Batam	1.632.000.000	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	12 Laporan	Kota Batam	1.632.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) laporan				remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				302.955.000				295.530.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				302.955.000				295.530.000	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Kota Batam	72.815.000	Nilai SAKIP PD) Indeks Pelayanan Kesekretariata n PD	72 Nilai 91.18 Nilai	Kota Batam	65.390.000	
2.08.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Kota Batam	12.037.000	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	Kota Batam	5.512.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Batam	10.047.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Batam	4.378.000	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Batam	1.990.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Batam	1.134.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	Kota Batam	60.778.000	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	Kota Batam	59.878.000	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Kota Batam	60.778.000	Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Kota Batam	59.878.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan	100%	Kota Batam	77.565.000	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan	100%	Kota Batam	77.565.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Perempuan yang terselesaikan				Perempuan yang terselesaikan				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	Kota Batam	77.565.000	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang dirujuk	50%	Kota Batam	77.565.000	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	Kota Batam	77.565.000	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	45 Layanan	Kota Batam	77.565.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan	100%	Kota Batam	152.575.000	Persentase Pengaduan	100%	Kota Batam	152.575.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD 2025				P-RKPD 2025				Catatan Penting
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
		Anak yang terselesaikan				Anak yang terselesaikan				
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	Kota Batam	152.575.000	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	100%	Kota Batam	152.575.000	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	52 Orang	Kota Batam	152.575.000	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	52 Orang	Kota Batam	152.575.000	
TOTAL					25.513.699.839				25.090.288.208	

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan penambahan anggaran yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya penambahan pegawai dari pengangkatan PPPK sebanyak 8 orang dan CPNS 2 orang
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya penambahan belanja modal untuk menunjang kegiatan administrasi kedinasan

Sedangkan untuk Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pengurangan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Perlindungan Perempuan

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Sub kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Dengan terbentuknya UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak maka untuk meningkatkan efisiensi kinerja pada UPTD maka program kegiatan sub kegiatan di UPTD di lakukan disintegrasi mandiri. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada UPTD pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Tabel 3.3

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam								22.688.471.387	25.090.288.208	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.688.471.387	25.090.288.208	
	Bidang dan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam								22.380.991.387	24.794.758.208	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPU							15.238.809.891	17.570.243.408	

NO	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
		AN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariat PD	100%	72 Nilai 91.18 Nilai	11.684.977.372	13.728.471.780	
	2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	10.592.778.622	12.902.304.288	
	2.08.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	10.592.778.622	12.851.764.288	menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai
	2.08.01.2.02.001		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	0	50.540.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN					
	2.08.01 .2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	283.449.550	212.376.500	
	2.08.01. 2.06.00 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	6.996.000	3.461.000	
	2.08.01. 2.06.00 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	47.742.050	43.788.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.838.000	5.103.000	
	2.08.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.036.000	5.041.000	
	2.08.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	12.071.000	6.035.500	
	2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	192.766.500	148.948.000	
	2.08.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai	100%	100%	393.938.000	74.349.500	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	rencana kebutuhan	rencana kebutuhan					
	2.08.01 .2.07.0 005		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	-	174.338.000	0	
	2.08.01 .2.07.0 006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	6 Unit	219.600.000	74.349.500	
	2.08.01 .2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah yang tersedia	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	237.516.200	362.696.492	
	2.08.01 .2.08.0 002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	12 Laporan	117.299.400	121.886.400	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Listrik yang Disediakan	Listrik yang Disediakan					
	2.08.01 .2.08.0 004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	120.216.800	240.810.092	
	2.08.01 .2.09		Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	177.295.000	176.745.000	
	2.08.01 .2.09.0 001		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2 Unit	2 Unit	79.030.000	81.530.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					
	2.08.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	80.805.000	80.805.000	
	2.08.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	21 Unit	17.460.000	14.410.000	
	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam /	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	11,50 / 75%	12% 78%	617.000.000	1.204.104.369	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			PEREMPUAN		Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil					
	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	80%	80%	152.000.000	10.328.000	
	2.08.02.2.01.002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	35 Dokumen	152.000.000	10.328.000	

NO	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.02.2.01.0002		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	Persentase perempuan yang dibina	80%	78%	465.000.000	1.193.776.369	
	2.08.02.2.02		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,	2 Dokumen	2 Dokumen	465.000.000	1.193.776.369,00	Menyesuaikan kebutuhan belanja kegiatan

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota					
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUN GAN PEREMPUA N	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaika n	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaika n	100%	100%	220.000.000	24.358.500	
	2.08.03 .2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanj uti	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklaju ti	40%	50%	220.000.000	24.358.500	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.03. 2.01.00 01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijaka, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/k ota	57 Dokume n	57 Dokume n	220.000.000	24.358.500	Adanya Efisiensi Anggaran
	2.08.04		PROGRAM PENINGKAT AN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5	4,6%	2.046.312.519	2.237.817.759	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.04 .2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina	80%	72%	2.046.312.519	2.237.817.759	
	2.08.04. 2.01.00 03		Pengembang an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembang an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	2 Laporan	2.046.312.519	2.237.817.759	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.05		PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatk an Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	Persentase OPD yang sudah memanfaatk an Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	80%	100%	190.000.000	17.223.000	
	2.08.05 .2.01		Pengumpula n, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaa n Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang aktif	80%	80%	190.000.000	17.223.000	

NO	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.05.2.01.0002		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	190.000.000	17.223.000	
	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Persentase capaian kluster kota layak anak	820	72%	310.000.000	187.748.000	
	2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standar PHA	Persentase lembaga layanan anak yang mempunyai standar PHA	70%	70%	310.000.000	187.748.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.06.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	310.000.000	187.748.000	
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	170.520.000	170.520.000	
	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan anak yang ditindaklanjuti (Rumus : persentase yang ditindaklanjuti/yang dilayani)	Persentase pengaduan anak yang ditindaklanjuti	75%	70%	101.500.000	101.500.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.07 .2.01.0 004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/pr ogram/kegiatan pencegahan KTA	40 Orang	40 Orang	101.500.000	101.500.000	
	2.08.07 .2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanj uti /dirujuk	Persentase lembaga layanan anak yang dibina	65%	50%	69.020.000	69.020.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.07 .2.03.0 006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/K ota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Ko ta	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatka n sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatka n sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	40 Orang	40 Orang	69.020.000	69.020.000	
		URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PENGENDA LIAN PENDUDU K DAN KELUARG A BERENCAN A							7.142.181.496	7.224.514.800	
	2.14.02		PROGRAM PENGENDAL IAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanak	Persentase Stekholder yang telah melaksanak	60%	60%	358.200.000	324.720.000	

NO	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					an kebijakan GDPK	an kebijakan GDPK					
	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	Persentase Stakeholder yang mengakomodir GDPK dalam kebijakan	60%	60%	45.000.000	15.120.000	
	2.14.02.2.01.0002		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	15.120.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			Tingkat Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota					
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	Persentase pemanfaatan data SIGA	100% / 50%	60%	313.200.000	309.600.000	
2	2.14.02.2.02.009		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	253.200.000	249.600.000	
	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	83% / 8.5	81.60%	4.336.651.600	3.154.706.800	
	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang	Persentase PUS yang ber KB baru	100% / 50%	52%	1.389.203.600	1.017.786.800	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					mendapatka n sosialisasi						
	2.14.03. 2.01.00 14		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	96 Organis asi	96 Organis asi	100.000.000	100.000.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.03. 2.01.00 13		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBang ga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangg a Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokume n	4 Dokume n	190.003.600	15.470.000	
	2.14.03. 2.01.00 12		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	34.000.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),	1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	240.000.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					dan Mini Lokakarya (Minilok)	dan Mini Lokakarya (Minilok)					
	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	739.200.000,00	628.316.800	
	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	4 Laporan	0	80.000.000,00	0,00	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Program KKBPK	Program KKBPK					
	2.14.03 .2.02		Pendayagun aan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaa n Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	Persentase tenaga lini lapangan atau kader yang aktif	70%	70%	192.000.000	512.000.000	
	2.14.03. 2.02.00 04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang	552 Orang	192.000.000	512.000.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.03. 2.02.00 06		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	-	-	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.03 .2.03		Pengendalia n dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota	Presentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan KB	84%	84%	2.596.798.000	1.473.720.000	
	2.14.03. 2.03.00 01		Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	12 Laporan	12 Laporan	161.100.000	158.400.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.03. 2.03.00 03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	625 Orang	1.383.724.000	1.222.620.000	
	2.14.03. 2.03.00 06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	0	1.051.974.000	0	
	2.14.03. 2.03.00 08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	12 Laporan	12 Laporan	0	92.700.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	Persentase kampung KB yang aktif	70%	72%	158.650.000	151.200.000	
	2.14.03.2.04.006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	13 Kampung	13 Kampung	158.650.000	151.200.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
					Kependuduk an, dan Keluarga Berencana)	Kependuduk an, dan Keluarga Berencana)					
	2.14.04		PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	60%	65%	2.447.329.896	3.745.088.000	
	2.14.02 .2.01		Pelaksanaan Pembanguna n Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	100%	72%	2.447.329.896	154.688.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	20 Unit	120.000.000	130.000.000	
	2.14.04.2.01.0021		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	94.259.969	24.688.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKA)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKA)					
	2.14.04. 2.01.00 24		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	350 Orang	0	2.233.069.927	0	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan Pemantauan dan Pendampingan	Persentase keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang dilakukan pemantauan dan pendampingan	100%	70%	-	3.590.400.000	
	2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	12 Laporan	12 Laporan	-	1.958.400.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			an, baduta/balita) a) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	n, baduta/balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					
	2.14.04.2.02.0005		Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	12 Laporan	12 Laporan	-	1.632.000.000	

NO	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			salin/kelahiran	salin/kelahiran	Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) laporan	Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK									307.480.000	295.530.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							307.480.000	295.530.000	
	2.08		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP PD) Indeks Pelayanan Kesekretaria tan PD	100%	72 Nilai 91.18 Nilai	72.000.000	65.390.000	

NO	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	12.000.000	5.512.000	
	2.08.01.2.06.00.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	4.378.000	
	2.08.01.2.06.00.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000	1.134.000	
	2.08.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	60.000.000	59.878.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	60.000.000	59.878.000	
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	77.565.000	77.565.000	
	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang dirujuk	30%	50%	77.565.000	77.565.000	

N O	KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
	2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kabupaten/kota	17 Layanan	45 Layanan	77.565.000	77.565.000	
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	157.915.000	152.575.000	
	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	100%	157.915.000	152.575.000	

N O	KODE URUSA N / PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (RKPD)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (P-RKPD)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUB AHAN
			RKPD 2025	P-RKPD 2025			RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025	
			Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/K ota							
	2.08.07 .2.02.0 006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatka n layanan	Jumlah AMPK yang mendapatka n layanan	52 Orang	52 Orang	157.915.000	152.575.000	
TOTAL PAGU									22.688.471.387	25.090.288.208	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam yakni Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan rencana kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program

Dalam tata cara penendalian tersebut dapat terlihat proram dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari proram kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian scenario dari dokumen perencanaan untuk daerah (RPJMD) yang akan berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Raja Isa No. 17 Telp.(0778) 470691/Fax. (0778) 470692 Batam Centre
e-mail:dp3ap2kb@batam.go.id Website : <http://www.p3ap2kb.batam.go.id>

BATAM



Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
Nomor: 296 Tahun 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- 20. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 21. Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Rencana Kerja Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,

Pada tanggal, 15 November 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM NOMOR 296 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENANGGUNG JAWAB
3	PERENCANA AHLI MUDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	SEKRETARIS
I.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	Anggota

II.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	
1	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
III.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	
1	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Perlindungan Anak	Anggota
IV.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
1	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota

V.	KELUARGA SEJAHTERA PENANGGUNG JAWAB BIDANG DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	
1	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator
2	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bina Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga	Anggota
3	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Anggota

Batam, 15 November 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006